



MULTI STAKEHOLDER PARTNERSHIPS DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN NABIRE

**Octovin Lidya Puspaningrum¹. Ahmad Rizali Pawane². Dafrin Muksin³.
Syamsul Bahri ABD. Rasyid⁴**

¹Prodi Pembangunan Masyarakat Desa, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa.

^{2,3,4}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.

Email: iyoemgil@gmail.com



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis multi-stakeholder partnership dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire, Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala kampung, kepala adat, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multi-stakeholder partnership dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire sudah mulai berkembang dan berjalan dengan baik. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal dilakukan melalui kesepakatan bagi hasil, dimana 60% hasil pengelolaan pariwisata untuk pemerintah dan 40% untuk masyarakat. Multi-stakeholder partnership ini membawa manfaat bagi masyarakat lokal, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Selain itu, kerjasama ini juga membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan meningkatkan daya tarik wisata. Meskipun multi-stakeholder partnership sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, yaitu: (1) Masih rendahnya pengetahuan/pendidikan masyarakat lokal terkait pariwisata; (2) Masih kurangnya kepedulian masyarakat lokal dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata; (3) Adanya pengaruh dari pihak luar bagi pemuda yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata; (4) Kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata bagi masyarakat lokal. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulannya, multi-stakeholder partnership merupakan strategi yang efektif untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Nabire. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat lokal, pariwisata di Kabupaten Nabire dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kata Kunci: Multi-stakeholder Partnership, Pengelolaan Pariwisata, Kabupaten Nabire, Papua.





Abstract

This study aims to analyze multi-stakeholder partnerships in tourism management in Nabire Regency, Papua. The research employs a qualitative descriptive method with primary data gathered through interviews with village chiefs, traditional leaders, and community members involved in tourism management. The findings indicate that multi-stakeholder partnerships in tourism management in Nabire Regency have begun to develop and operate effectively. Collaboration between the government and local communities is facilitated through a profit-sharing agreement, where 60% of tourism revenue goes to the government and 40% to the local community. This multi-stakeholder partnership benefits the local community by increasing income and reducing unemployment. Additionally, it assists the government in preserving tourist attractions and enhancing their appeal. Despite the effective operation of multi-stakeholder partnerships, there are several challenges that need to be addressed: (1) Limited knowledge/education among local communities regarding tourism; (2) Insufficient local community involvement in preserving and developing tourism; (3) Influence from external parties on youth involved in tourism management; (4) Lack of training provided by the Tourism Office to local communities. Efforts to overcome these challenges include enhancing education and training for local communities and strengthening collaboration between the government and locals. In conclusion, multi-stakeholder partnerships are an effective strategy for developing tourism in Nabire Regency. With strong collaboration between the government and local communities, tourism in Nabire Regency can develop optimally and benefit all stakeholders.

Keywords: *Multi-stakeholder partnership, tourism management, Nabire Regency, Papua.*

Pendahuluan

Kepariwisata di Indonesia yang telah diamanahkan oleh UU No.10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selanjutnya pengertian pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (M.Liga Suryadana, 2013:47).



Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable developmant* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah nasional dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan Indonesia.

Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan nasional tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan nasional kita.

Kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh UU No.10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.



Selanjutnya pengertian pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (M.Liga Suryadana, 2013:47).

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable developmant* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh UU No.10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selanjutnya pengertian pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (M.Liga Suryadana, 2013:47).

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable developmant* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.



Menurut Edward Inskeep (1991), ada lima unsur penting yang melekat pada suatu obyek wisata, yaitu: (a) Daya tarik. Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer karena keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen. Daya tarik suatu obyek wisata agar dikunjungi wisatawan antara lain: keindahan alam, seperti laut, pantai, danau, dan sebagainya; iklim atau cuaca misalnya daerah beriklim tropis; kebudayaan, sejarah, etnik/kesukuan; dan kemudahan pencapaian obyek wisata. Atau dapat juga gabungan dari beberapa komponen di atas; (b) Prasarana Wisata. Prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani mereka (wisatawan) selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi, sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan obyek wisatanya. Prasarana wisata cenderung mendukung kecenderungan perkembangan pada saat yang bersamaan.

Prasarana wisata ini terdiri dari : (1) Prasarana akomodasi. Prasarana akomodasi ini merupakan fasilitas utama yang sangat penting dalam kegiatan wisata. Proporsi terbesar dari pengeluaran wisatawan biasanya dipakai untuk kebutuhan menginap, makan dan minum. Daerah wisata yang menyediakan tempat istirahat yang nyaman dan mempunyai nilai estetika tinggi, menu yang cocok, menarik, dan asli daerah tersebut merupakan salah satu yang menentukan sukses tidaknya pengelolaan suatu daerah wisata; (2) Prasarana pendukung. Prasarana pendukung harus terletak ditempat yang mudah dicapai oleh wisatawan. Pola gerakan wisatawan harus diamati atau diramalkan untuk menentukan lokasi yang optimal mengingat prasarana pendukung akan digunakan untuk melayani mereka. Jumlah dan jenis prasarana pendukung ditentukan berdasarkan kebutuhan wisatawan; (3) Sarana Wisata. Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan berbagai sarana yang dimaksud.

Selanjutnya kegiatan wisata memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan baik masyarakat maupun pemerintah daerah setempat apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Paradigma kegiatan wisata di kawasan wisata pantai saat ini lebih mengutamakan pada keuntungan ekonomi, yaitu bagaimana menarik wisatawan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada. Apabila suatu kawasan wisata sudah tidak mampu lagi menampung jumlah wisatawan (melebihi daya dukung kawasan) maka yang akan terjadi selanjutnya adalah penurunan atau degradasi lingkungan.

Kemitraan multi-pihak kepentingan adalah sarana dimana aktor yang tertarik dapat berkolaborasi dalam tantangan atau peluang tertentu untuk mencapai dampak atau hasil yang lebih besar daripada yang bisa mereka capai sendiri. Multi-stakeholder melibatkan organisasi dari berbagai sektor masyarakat, seringkali lebih inovatif, lebih berkelanjutan, lebih efisien dengan pendekatan yang lebih sistematis. Kekuatan



multistakeholder partnership berasal dari pendekatannya yang beragam, sumber daya teknis, manusia, sosial atau ekonomi yang berorientasi pada masyarakat. Multistakeholder partnership dapat digunakan dimanapun asal ada keselarasan kepentingan diantara para aktor yang berbeda dan di mana ada potensi kegiatan untuk berkontribusi pada SDGs (Sustainable Development Goals) sekaligus menghasilkan nilai bagi semua pihak baik bisnis, sosial, atau lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Nabire dalam pengelolaan pariwisata saat ini sudah berjalan baik. Masing-masing pihak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi sarana dan prasarana pada pariwisata terutama obyek wisata pantai. Sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana dari program yang telah dirancang oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah melibatkan masyarakat agar dapat bersama-sama merancang program yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Selain itu, masyarakat diberikan wewenang untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata secara khusus wisata pantai.

Multi stakeholder partnership merupakan suatu kerjasama antar pihak dalam memanfaatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian dari masing-masing actor dalam menciptakan solusi perkembangan berkelanjutan disuatu daerah. Dengan adanya multi stakeholder partnership dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire diharapkan pariwisata berkembang dan terkelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan daya tarik serta perekonomian bagi masyarakat maupun Kabupaten Nabire.

Nabire adalah salah satu Kabupaten di Papua Tengah yang merupakan wilayah paling timur. Kabupaten Nabire memiliki potensi objek wisata yang cukup baik. Objek Wisata yang bisa dinikmati adalah: (1) Wisata Bahari. Meliputi kawasan laut teluk cendrawasih yang memiliki potensi yang sangat indah dan beraneka ragam dan berbagai biota laut seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias serta gugusan pulau-pulau kecil di lepas pantai wilayah Nabire seperti Pulau Moor, Mambor, Hariti, Ahe, Babi, Nuburi, Pepaya, Nutabari, Mangga, Umbur, Anggarameos, Kikir dan Nuhmarau ; (2) Wisata Pantai. Wisata Pantai yang terdapat di Nabire yaitu Pantai Gedo, Pantai Yamari, Pantai Burate, Pantai Nusi, Pantai Nabire (Maf) dan Pantai Irio, Pantai Merry; (3) Wisata Alam. Meliputi : Danau Mamae, Air Terjun Kura-kura, Kolam Pemancingan di Desa Kalisemen Wanggar, Bendungan Kalibumi di Desa Bumiraya Wanggar dan sejumlah gugusan pegunungan bagi para pecinta alam; (4) Wisata Budaya. Berbagai jenis kesenian tradisional dan adat istiadat masyarakat yang tidak terdapat di daerah lain di Indonesia dapat dinikmati pada saat *event-event* tertentu seperti festival seni budaya, perayaan hari-hari besar agama, peringatan hari-hari besar tertentu dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengeluarkan Perda No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kepariwisataannya yaitu bahwa pengelolaan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan, menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi



pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Multi stakeholder partnership dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire sejauh ini sudah mulai berkembang dan berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui kendala-kendala dilapangan. Kendala atau hambatan yang ditemui dilapangan antara lain: masih rendahnya pengetahuan/pendidikan masyarakat lokal terkait pariwisata, masih kurangnya kepedulian masyarakat lokal dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Nabire, adanya pengaruh dari pihak luar bagi pemuda yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata bagi masyarakat lokal yang hendak bergabung dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul: “Multistakeholder Patnership Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Nabire”

Metode

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan maksud hasil penelitian akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan aktual terhadap yang akan di teliti (Sugiyono, 2009:1). Metode deskriptif pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Pada tahap deskriptif data yang diperoleh cukup banyak, bervariasi dan belum tersusun dengan jelas.(Sugiyono, 2016:19). Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data dan fakta yang ditemui dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Multistakeholder Patnership

Istilah Multi Stakeholder Patnership digunakan di sini untuk merujuk untuk apa yang juga dikenal sebagai platform multi pemangku kepentingan, proses, kemitraan dan jaringan. Dalam tinjauan ini Multi Stakeholder Patnership didefinisikan sebagai proses interaktif yang diatur dengan sengaja yang menyatukan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog, pengambilan keputusan dan/atau implementasi mengenai tindakan yang berusaha untuk mengatasi masalah yang memiliki kesamaan atau untuk mencapai tujuan demi keuntungan bersama (Sarmiento Barletti et al., 2020).

Multi Stakeholder Patnership digunakan untuk menggambarkan partisipasi dari berbagai sektor (lembaga, lembaga, individu), yang berbagi sumber daya menuju tujuan bersama dalam proyek tertentu. Multi Stakeholder Patnership dapat digunakan di berbagai bidang yang membutuhkan kerjasama dengan menggunakan berbagai sumber. Di bidang lain, kemitraan multi-sektor dapat berfokus terutama pada pengembangan bisnis, teknologi inovasi, atau masalah kesehatan dan kebencanaan (Xue et al., 2020).

Multi Stakeholder Patnership memiliki beberapa keunggulan, antara lain para pemangku kepentingan secara bersama-sama lebih mampu menangani masalah yang kompleks daripada menanganinya sendiri. Para pemangku kepentingan dapat mengakses sumber daya satu sama lain dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan



lainnya, (Fehmita Mubin, 2019). Menurut Pak Natus mengatakan bahwa sudah ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dengan perjanjian bagi hasil. Masyarakat dan pemerintah sama-sama mengurus atau mengelola pariwisata, khususnya pantai.

Selanjutnya diperkuat oleh pendapat Pak William selaku kepala adat. Beliau mengatakan bahwa memang betul sudah ada kerjasama antara Dinas Pariwisata dan masyarakat untuk mengelola pariwisata. Nanti hasil yang diperoleh akan dibagi 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk masyarakat. Setelah melihat pernyataan dari Pak Natus Dan Pak William maka dapat dikatakan Multi stakeholder partnership dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire saat ini sudah mulai berkembang dan berjalan dengan baik. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lokal tidak dilakukan secara tertulis, tetapi hanya dilakukan kesepakatan antara pemerintah dan ketua adat yang bertindak sebagai penanggungjawab masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire. Kesepakatan yang terjalin hingga saat ini berjalan dengan baik. Dalam kesepakatan tersebut, disepakati sistem bagi hasil yaitu 60% untuk pemerintah dan 40% untuk masyarakat lokal. Namun hasil yang diperoleh dipegang ketua adat dan akan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah disini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire. Setelah pendapatan dari pariwisata tersebut diterima, maka pemerintah akan menyerahkan 40% bagian dari hasil tersebut kepada kepala adat untuk dibagikan secara adil pada masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

Sistem multi stakeholder partnership ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Nabire. Dengan adanya multi stakeholder partnership masyarakat lokal menyambut baik tawaran dari pemerintah terkait kerjasama tersebut. Masyarakat merasa terbantu dan angka pengangguran di sekitar area wisata pun berangsur-angsur berkurang. Pengembangan suatu obyek wisata di Kabupaten Nabire membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk dapat memperoleh pekerjaan. Selain itu, jika dilihat dari segi ekonomi, maka perekonomian masyarakat lokal akan meningkat dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal di sekitar obyek wisata Kabupaten Nabire.

Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Nabire

Mendasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009, paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu :

a. Pihak Pemerintah atau Pemerintahan Daerah

Di banyak Negara termasuk di Indonesia, kedudukan pihak Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah masih memiliki peran dan fungsi sangat penting dan strategis dalam pengembangan industri kepariwisataan di suatu destinasi. Di Indonesia sendiri, peran Pemerintah (Nasional) disamping masih berfungsi utama sebagai regulator utamanya dalam menentukan norma, standard, prosedur dan kriteria pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan.

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain (industri dan



masyarakat) untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No.10 tahun 2009.

Peranan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata sangat menentukan berkembang tidaknya suatu objek wisata, contohnya dapat kita lihat dalam hal penyediaan infrastruktur dan memperluas jaringan kerja aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar Negeri. Selain itu pemerintah juga berpartisipasi dalam hal penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan.

b. Swasta / Industri Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan mulai dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat daerah tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri kepariwisataan yang berperan di private sector.

Jiwa bisnis dari para pelaku usaha kepariwisataan di private sector ini utamanya memandang bahwa usaha pembangunan kepariwisataan adalah sebagai kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan memperoleh keuntungan melalui pengadaan barang dan penyedia jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan atau pasar pariwisata. Misalnya dalam kegiatan usaha penyediaan sarana akomodasi, transportasi, jasa pemanduan, atraksi dan daya tarik wisata, kawasan pariwisata, restoran, souvenir/ cinderamata maupun penyedia jasa yang lain yang terkait dengan kepariwisataan.

c. Pihak Masyarakat

Masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah (hosting) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Umumnya masyarakat telah memposisikan kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayahnya sebagai peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan serta nilai tambah lain diluar aspek ekonomi seperti kebanggaan identitas, kebersihan, keindahan dan kualitas lingkungan yang semakin baik (Bambang Sunaryo,2013 :118-119).

Dalam upaya pengelolaan maupun pengembangan suatu obyek wisata, tidak terlepas dari dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal tersebut karena pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan pilar utama agar pengelolaan obyek wisata dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

Dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, yang paling di butuhkan dari sektor publik adalah adanya perubahan yang baik dalam cara berpikir maupun bertindak, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu bangunan penyelenggaraan pemerintahan sentralistik dan berwawasan lokus tunggal yang berupa birokrasi pemerintahan (Government Bureaucracy) untuk menuju pada paradigma baru yang berupa model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dan berlokus jamak (Bambang Sunaryo :81).

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire sudah mulai berjalan dengan baik. Obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Nabire mulai berkembang dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui kerjasama yang disepakati antara Pemerintah dan masyarakat lokal.



Perkembangan pariwisata di Kabupaten Nabire tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun peran masyarakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire. Hal itu disebabkan karena masyarakat lokal lebih mengetahui keadaan ataupun sejarah dari setiap obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Nabire. Selain itu, multi stakeholder partnership yang terjalin saat ini merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Masyarakat bukan hanya sekedar membantu pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, tetapi masyarakat lokal juga memperoleh keuntungan yaitu meningkatnya pendapatan yang menyebabkan perekonomian masyarakatpun membaik.

Menurut Bapak William He selaku kepala kampung mengatakan bahwa sudah ada peraturan dari pemerintah untuk pariwisata di Kabupaten Nabire yaitu Perda No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pariwisata. Dengan adanya peraturan itu diharapkan pariwisata di kabupaten Nabire dapat dikelola dengan baik dan bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat sendiri. Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Antonius selaku masyarakat yang ikut dalam pengelolaan pariwisata. Menurut Bapak Antonius Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pariwisata. Sehingga dalam kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan demikian, proses pengelolaan pariwisata diharapkan dapat berjalan dengan baik, obyek-obyek wisata dapat terurus dan terjaga kelestariannya, meningkatkan daya tarik obyek wisata yang dimiliki serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak William He dan Antonius maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire saat ini sudah mulai berkembang dan berjalan baik dengan adanya multi stakeholder partnerships yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat lokal. Pariwisata di Kabupaten Nabire meliputi wisata alam, wisata pantai, wisata bahari, wisata agro. Semua obyek wisata tersebut mempunyai daya tarik masing-masing yang diminati oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Nabire. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat agar pariwisata di Kabupaten Nabire berkembang dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui multi stakeholder partnership, dimana hubungan kerjasama ini bertujuan untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Nabire serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di sekitar area pariwisata.

Dalam pengelolaan pariwisata tentunya akan ditemui berbagai kendala, baik dari sarana, prasarana, ataupun sumber daya manusia. Menurut Bapak Yakub mengatakan bahwa pariwisata di Kabupaten Nabire sekarang sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan, tetapi masih ada masalah yang jadi penghambat dalam meningkatkan pariwisata. Masalah yang biasa terjadi yaitu wisatawan masih sering mengeluh tentang sampah dan toilet yang tidak bersih. Selain itu, ada juga masalah dari anak-anak muda yang bekerja di tempat wisata, mereka masih mengkonsumsi alkohol waktu kerja. Hal itu bisa menimbulkan keributan yang akan mengakibatkan wisatawan yang datang merasa terganggu dan tidak nyaman. Adapun pendapat dari Bapak Natus bahwa berkembangnya obyek wisata sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola obyek wisata tersebut. Dalam hal ini SDM mempunyai peran yang sangat penting, maka



Pemerintah (Dinas Pariwisata) sudah mengadakan pelatihan bagi masyarakat yang akan terlibat langsung di dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata.

Selanjutnya pernyataan tersebut di perkuat oleh pendapat dari Bapak William selaku kepala adat mengatakan bahwa memang benar pariwisata di Kabupaten Nabire sudah mulai berkembang, tetapi masih ada juga permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kebersihan area obyek wisata, kebersihan kamar mandi, anak-anak muda yang masih sering mabuk (mengkonsumsi alkohol), tempat sampah di tempat wisata juga masih kurang. Tapi kami sudah sudah membiacarkan itu ke Dinas Pariwisata, supaya supaya bersama-sama mencari solusinya.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yakub dan William maka dapat dikatakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire sudah mulai berkembang dan berjalan baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang harus segera mendapatkan penanganan dari Dinas Pariwisata bersama masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Kendala yang ditemui dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire yaitu masih kurangnya Pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait pariwisata, sehingga dalam pengelolaan pariwisata belum terlaksana secara optimal. Selain itu, para pemuda yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata masih mudah terpengaruh oleh pihak luar yang ingin menghambat perkembangan pariwisata di Kabupaten Nabire. Pengaruh yang diberikan dengan mengajak para pemuda mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga para pemuda tidak bekerja dengan baik. Bahkan terkadang justru menimbulkan keributan di sekitar area pariwisata. Hal tersebut yang perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah beserta kepala adat yang bertanggungjawab terkait masyarakat yang bekerja di obyek-obyek wisata. Apabila tidak ditangani segera, maka akan berdampak apada perkembangan pariwisata. Dimana akan menurunkan daya tarik pariwisata dan menurunnya kunjungan wisatawan.

Kesimpulan

Pariwisata di Kabupaten Nabire memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut meliputi wisata alam, wisata pantai, wisata bahari, dan wisata agro. Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kepariwisata untuk mengatur pengelolaan pariwisata di daerahnya. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire saat ini sudah mulai berkembang dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Kerjasama tersebut dikenal dengan istilah multi stakeholder partnership.

Multi stakeholder partnership di Kabupaten Nabire dilakukan dengan cara: Pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana pariwisata, terutama obyek wisata pantai. Masyarakat berperan sebagai pelaksana program yang dirancang oleh pemerintah. Masyarakat dilibatkan dalam perancangan program pengelolaan pariwisata. Masyarakat diberikan wewenang untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pariwisata. Multi stakeholder partnership di Kabupaten Nabire memiliki beberapa manfaat, yaitu: Meningkatkan daya tarik wisata. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menciptakan lapangan pekerjaan. Melestarikan budaya dan lingkungan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nabire, yaitu: Rendahnya pengetahuan/pendidikan masyarakat



lokal terkait pariwisata. Kurangnya kepedulian masyarakat lokal dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata. Adanya pengaruh dari pihak luar bagi pemuda yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata bagi masyarakat lokal yang hendak bergabung dalam pengelolaan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Nabire perlu terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar pariwisata di Kabupaten Nabire dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerahnya. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pariwisata dan bagaimana cara mengelola pariwisata dengan baik. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal tentang pengelolaan pariwisata.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Menciptakan regulasi yang jelas dan kondusif untuk pengembangan pariwisata. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan menerapkan saran-saran yang diberikan, diharapkan pariwisata di Kabupaten Nabire dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerahnya.

Daftar Pustaka

- Andi Rif'an, A. (2018). Daya tarik wisata pantai wediombo sebagai alternatif wisata bahari di daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal Geografi Vol, 10(1)*, 63-73.
- Bambang Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara, 3(2)*.
- Fitriani, E., & Selinaswati, D. M. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKOWISATA SUNGAI PINANG. *Jurnal Socius Vol, 4(1)*.
- Foster, Timothy. R.V. (1999). *101 Way to Boost Customer satisfaction (101 Cara Meningkatkan Kepuasan Pelanggan)*, PTElex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasibuan. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Liga Suryadana. (2013). *Sosiologi Pariwisata; Kajian Kepariwisata Dalam Paradigma*, Buku Pendidikan –Anggota IKAPI mencerahkan Kehidupan, Bandung.
- Maulina, G., Nuzula, N. F., & Nurlaily, F. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal Terhadap Struktur Modal (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/ Vol, 58(1)*.
- Nawawi, A. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai depok di desa kretek parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata, 5(2)*, 103-109.
- Prasiasa. (2013). *Wacana Kontemporer Pariwisata*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Rimsky K Judisseno. (2017). *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sihasale, D. A. (2013). Keanekaragaman hayati di kawasan pantai Kota Ambon dan konsekuensi untuk pengembangan pariwisata pesisir. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 1(1)*, 20-27.



- Slamet Margono. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, IPB, Bogor.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*, Tesis PPS – UNY, Kulon Progo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interakdi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suwantoro. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*, Penerbit Andi.
- Walgito. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*, Andi, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Perda Kabupaten Nabire No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kepariwisataaan.